



Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten KARO

Ummu Huzaifah Br Purba

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: ifapurba03@gmail.com

Nurlaila Nurlaila

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nurlaila@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the level of accountability and transparency in the financial reports of Gundaling II Subdistrict and identify practices that influence community involvement in the supervision and use of public funds. Qualitative research methods are used by collecting data through analysis of financial reports, interviews with related parties, and direct observation of the financial management process. The results of the analysis show that although financial reports have generally been prepared well, there are still several areas where aspects of accountability and transparency need to be improved. These findings highlight the need to improve financial management procedures, use technology to improve transparency, and expand public participation in financial oversight. The implication of this research is the importance of implementing more transparent and accountable practices in local government financial management in order to increase community involvement and trust in the use of public funds.*

Keywords: *accountability, transparency, financial reports*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan Kelurahan Gundaling II serta mengidentifikasi praktik yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana publik. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui analisis laporan keuangan, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum telah disusun dengan baik, masih terdapat beberapa area di mana aspek akuntabilitas dan transparansi perlu ditingkatkan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan prosedur pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi untuk memperbaiki transparansi, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan praktik yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan pemerintahan setempat guna meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan dana publik.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta bertanggung jawaban terhadap hasil kerjanya. (Penny Kusumastuti: 2019)

Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam pembangunan organisasi non-profit dan lembaga masyarakat lainnya. Ini memungkinkan para donatur dan anggota masyarakat

untuk memahami bagaimana dana dan sumber daya digunakan, serta dampak dari program dan kegiatan yang dilakukan. (N. Wahyudi : 2018)

Laporan keuangan merupakan bentuk bahasa bisnis. Laporan keuangan memberikan data yang terolah kepada pengguna tentang posisi keuangan perusahaan. Memahami laporan keuangan perusahaan memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami posisi keuangan perusahaan. (Werner R. Murhadi: 2019)

Gundaling II merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gundaling II ini memiliki 8 Lingkungan yang masing-masing memiliki kepala lingkungan untuk menerima dan memberikan kemauan masyarakat di setiap lingkungannya kepada Kelurahan Gundaling II. (Simarmata, Buana B: 2023)

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas publik, seperti kelurahan, merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien. Laporan keuangan merupakan alat utama dalam memperlihatkan kesehatan finansial sebuah lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, Kelurahan Gundaling II, sebagai entitas pemerintahan lokal, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan praktik akuntabilitas dan transparansi yang memadai dalam pelaporan keuangannya.

Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan suatu kelurahan tidak hanya memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalamnya tetapi juga mempengaruhi keterlibatan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan Kelurahan Gundaling II menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana standar dan prosedur yang telah diterapkan serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan Kelurahan Gundaling II. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kelengkapan, ketepatan, dan keterbacaan laporan keuangan yang disajikan, serta bagaimana implikasinya terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana publik. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis laporan keuangan, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik keuangan Kelurahan Gundaling II.

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2022: Akuntabilitas mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mahmudi (2017), mengemukakan dua jenis akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability), Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability).

Transparansi

Menurut Mariasi Purba (2018) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengelolaan. Transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, perkembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Menurut peraturan pemerintah no.71 Tahun 2022, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan prinsip bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan penuh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kegiatan keuangannya, sumber daya yang dipercayakan, dan kepatuhan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2019), Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, khususnya informasi keuangan dan perpajakan, harus disajikan dalam format yang tepat dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai praktik fisik, informasi dan penjabarannya.

Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2022 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Hal tersebut untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yang: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Raymond Budiman (2021) Laporan keuangan adalah dokumen yang penting dalam menyajikan informasi keuangan suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas entitas tersebut dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang masing-masing memberikan informasi yang berbeda tentang aspek keuangan entitas.

Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu.

Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi yang konsisten dan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum, seperti IFRS atau GAAP, untuk memastikan kualitas dan konsistensi informasi yang disajikan. Para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan manajemen, melakukan analisis dan interpretasi terhadap informasi yang terkandung di dalamnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pemahaman yang baik tentang laporan keuangan, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih informasi dan memahami kondisi keuangan entitas dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan di Kelurahan Gundaling II, seperti staf administrasi, kepala, atau warga, untuk memahami persepsi, pengalaman, dan praktik terkait pelaporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Dari penelitian ini peneliti mengambil objek Kelurahan Gundaling II sebagai tempat penelitian. Penyajian data dalam meneliti digunakan dalam pernyataan dari beberapa hasil wawancara di kelurahan tersebut. Dalam melakukan wawancara ada beberapa informan yang dapat memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Dari beberapa informan, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggambarkan bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Kelurahan Gundaling II. dari beberapa sampel yang disediakan, peneliti sudah mendapatkan informasi mengenai bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang dapat di olah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang informan yang juga merupakan Lurah/Staff di Kantor Kelurahan Gundaling II, yaitu ibu NV selaku lurah Gundaling II yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang ada di kelurahan tersebut yang nantinya akan dilaporkan ke Kecamatan karena posisi kelurahan memiliki pusat pengumpulan yaitu di kecamatan dari kota itu. Seperti yang sudah peneliti ketahui setiap tahun kelurahan mengadakan rapat Musrenbang yang melibatkan masyarakat untuk membahas mengenai perencanaan dalam satu tahun. Hal ini dipertegas oleh ibu NV selaku lurah Gundaling II, sebagai berikut:

“Menurut saya akuntabilitas itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai klasifikasi kerja untuk melaporkan hasil kegiatan kita, dimana segala bentuk pertanggung jawaban itu selaras dengan pembahasan yang ada di Musrenbang serta apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. laporan keuangan tersebut akan kami laporkan ke Kecamatan karena kelurahan juga memiliki pusat pengumpulan yaitu Kecamatan.”

Sementara itu menurut Bapak SS selaku staff kelurahan menyatakan bahwa akuntabilitas itu merupakan laporan pertanggung jawaban. Laporan itu dibuat memang sudah tersusun dan sangat terstruktur mengikuti peraturan dimana isinya perencanaan berhubungan dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang selalu di monitoring evaluasi oleh pusat, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini di pertegas oleh Bapak SS selaku Staff lurah Gundaling II, sebagai berikut:

“Jadi dek, akuntabilitas dikami itu akan di pertanggungjawabkan dek, jadi semua sudah terusun dan sangat terstruktur. Dimulai dari perencanaan kami ada musrenbang di awal tahun, dari situ kami akan memilih masukan dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kedepan yang mana kegiatan yang harus kita utamakan untuk kita lakukanterlebih dahulu dan itu juga harus mengikuti aturan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan. Lalu dalam

pelaksanaannya kami selalu ada monev dari pusat untuk meninjau kegiatan yang kita lakukan hingga kegiatan itu selesai sampai pada laporan keuangan.”

Berbeda pula dengan ibu NT selaku staff dibidang pengadministrasian keuangan kelurahan gundaling II, beliau menyatakan bahwa akuntabilitas itu merupakan surat pertanggung jawaban laporan keuangan dimana surat pertanggung jawaban akan dilakukan setiap tahun dan setiap pelaksanaan kegiatan harus dibuatkan surat pertanggung jawabannya untuk dilaporkan ke Kecamatan. Hal ini di pertegas oleh ibu NT selaku staff pengadministrasian kelurahan Gundaling II, sebagai berikut:

“Menurut saya, pertanggung jawaban pelaporan saya ke kecamatan akan berbentuk dokumen pertanggung jawaban, baik itu laporan keuangan atau bentuk lainnya.. Kalau kita sudah mengajukan sesuai surat pertanggung jawabannya pasti kami selalu lakukan setiap tahun. Kalau saya biasanya laporan surat pertanggung jawaban itu setelah kita mengajukan ke kecamatan, jika sudah ok, saya arsip berkasnya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep akuntabilitas yang tergambar dalam penelitian Kelurahan Gundaling II adalah adanya pemahaman yang konsisten di antara informan, baik dari Lurah, Staff Kelurahan, maupun Staff Pengadministrasian Keuangan. Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelurahan, melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat Musrenbang. Proses ini mencakup perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan kegiatan yang terus dimonitor dan dievaluasi, serta pembuatan laporan keuangan sesuai aturan.

Bentuk Akuntabilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari dokumen mengenai laporan keuangan Kelurahan Gundaling II, Berikut beberapa penjelasannya. Dalam konteks Kelurahan Gundaling II, penerapan konsep akuntabilitas laporan keuangan menjadi sebuah proses yang holistik dan terintegrasi, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan kegiatan yang terukur, dan penyusunan laporan keuangan dengan tingkat akurasi dan transparansi yang tinggi. Salah satu aspek utama dari akuntabilitas ini adalah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam rapat Musrenbang.

Rapat Musrenbang bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan tahunan kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan prioritas masyarakat terakomodasi dalam alokasi dana dan kegiatan yang direncanakan.

Proses perencanaan yang terstruktur ini dimulai pada awal tahun melalui rapat Musrenbang. Keputusan terkait alokasi dana untuk berbagai kegiatan diambil dengan

melibatkan masukan dari masyarakat. Perencanaan ini tidak hanya mencakup alokasi dana, tetapi juga mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Gundaling II dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pentingnya tahap pemantauan dan evaluasi menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap langkah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pusat melakukan pemantauan secara rutin dan evaluasi kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan menjadi elemen sentral dalam proses pertanggungjawaban. Laporan ini mencerminkan secara rinci dan akurat semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan kelurahan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, melainkan juga sebagai instrumen yang memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Selain laporan keuangan, surat pertanggungjawaban dalam pengadministrasian keuangan juga menjadi bagian integral dalam proses ini. Surat ini mencakup laporan keuangan dan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, menambahkan lapisan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan kelurahan.

Secara menyeluruh, pendekatan holistik ini menciptakan suatu sistem yang memastikan setiap tahap kegiatan di Kelurahan Gundaling II dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Melibatkan partisipasi masyarakat, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar, kelurahan ini mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja.

Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang atau entitas dalam mengelola sumberdaya yang diberikan menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk pengelola sumberdaya yang diberikan kepadanya dengan baik serta memastikan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat maupun partners dapat tersampaikan dengan baik dan akuntabel.

Analisis akuntabilitas laporan keuangan Kelurahan Gundaling II mencakup beberapa aspek penting untuk menilai keterbukaan, keakuratan, dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat. Pertama, evaluasi dilakukan terhadap tingkat kepatuhan

Kelurahan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencakup pemastian bahwa prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan pengakuan, dan metode pengukuran yang diadopsi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Selanjutnya, fokus analisis tertuju pada keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan. Dalam konteks ini, penelitian memeriksa sejauh mana informasi keuangan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Pengungkapan transparan terkait alokasi dana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menjadi sorotan khusus, karena hal ini merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Aspek ketepatan waktu penyampaian laporan menjadi perhatian lainnya. Keterlambatan dalam penyampaian laporan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk memahami penyebab keterlambatan dan dampaknya terhadap kredibilitas Kelurahan.

Kualitas pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan menjadi fokus analisis berikutnya. Sistem pengendalian internal yang baik mendukung keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Seiring itu, peran auditor independen dan opini auditor digunakan sebagai tolok ukur eksternal terhadap integritas laporan.

Responsivitas Kelurahan terhadap pertanyaan dan kritik dari masyarakat menjadi indikator keterbukaan dan kemauan untuk beradaptasi. Pelibatan masyarakat dalam proses musrenbang dan evaluasi pencapaian tujuan Kelurahan menjadi elemen kunci dalam menilai sejauh mana partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dengan menyeluruh mencakup aspek-aspek tersebut, analisis akuntabilitas laporan keuangan Kelurahan Gundaling II bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat keterbukaan dan transparansi pemerintahan tingkat kelurahan tersebut kepada masyarakatnya.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Kelurahan Gundaling II telah mengikuti dan menerapkan aturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Keuangan Kelurahan Gundaling II sudah memasukkan unsur laporan keuangan seperti yang tertera pada lampiran pertama kerangka konseptual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintah paragraf ke 28. Sebagai bentuk akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak stakeholders. Penyajian laporan keuangan tersebut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kelurahan Gundaling II selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung

jawabkan dengan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu UT menyatakan bahwa transparansi merupakan konsep atau sifat dari suatu sistem atau proses yang memungkinkan informasi atau kebijakan untuk mudah diakses, dipahami, dan dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi menciptakan lingkungan di mana informasi dapat diperoleh dengan jelas dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Menurut Ibu UT transparansi tersebut sudah menjadi hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang informasinya jelas dan tanpa adanya hambatan, maka dari itu beliau menegaskan kembali sebagai berikut:

“jadi dek untuk transparansi, daerah kelurahan gundaling dua ini sangat sangat tersusun dan sangat terstruktur, tidak ada unsur rekayasa dan politik mulai dari awal sampai akhir. Transparansi ini juga bisa dikatakan sebagai sistem atau proses sehingga dapat memungkinkan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat nantinya.”

Sementara dari Bapak JT salah satu staff dari Kelurahan Gundaling II bahwasanya transparansi itu merujuk pada tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintahan tingkat kelurahan atau desa. Ini melibatkan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan, dan informasi penting lainnya dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat. Beliau menegaskan kembali sebagai berikut:

“Kalau saya ditanya masalah transparansi ini lebih merujuk kepada tingkatan keterbukaan dan aksesibilitas informasinya dek, jadi nanti praktik praktik yang dirancang itu nantinya akan dipastikan apakah kebijakan, keputusan, dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau tidak dan hal tersebut akan dimiliki oleh pemerintahan tingkat kelurahan di kabupaten karo ini.”

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sebagai elemen krusial dalam menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mudah diakses. Ibu UT menegaskan bahwa transparansi di daerah tersebut telah terimplementasi tanpa rekayasa atau politik, menekankan keberlanjutan dan integritas dalam penerapannya. Sementara itu, Bapak JT memandang transparansi sebagai tingkatan keterbukaan dan aksesibilitas informasi, dengan fokus pada praktik-praktik yang memastikan informasi dapat diakses oleh masyarakat. Kesimpulannya, transparansi di Kelurahan Gundaling II bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian integral dari tata kelola pemerintahan tingkat kelurahan, memberikan dasar bagi kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Bentuk Transparansi

Indikator transparansi menurut teori Andrianto (2017) laporan keuangan dikatakan transparan jika adanya akses Masyarakat terhadap transparansi anggaran dan adanya keterlibatan Masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Bentuk transparansi Laporan Keuangan Kelurahan Gundaling II mencakup pengungkapan yang jelas mengenai penggunaan dana dalam konteks Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Melalui laporan keuangan ini, Kelurahan berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah dan pemahaman yang transparan terkait alokasi anggaran, pengeluaran, serta hasil musrenbang kepada masyarakat. Rinciannya mencakup penggunaan dana untuk program-program prioritas yang diidentifikasi melalui musrenbang, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan ini menciptakan dasar bagi partisipasi aktif warga dalam proses musrenbang, memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari beragam lapisan masyarakat di Kelurahan Gundaling II. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mendukung prinsip-prinsip musrenbang yang inklusif dan partisipatif di tingkat kelurahan.

Hal ini disampaikan oleh ibu RH selaku staff dari Kelurahan Gundaling II:

“Begini nak, kita bikin laporan keuangan yang transparan kali, terutama soal dana dan proyek-proyek dari Musrenbang. Laporan ini kita desain supaya gampang diakses dan dimengerti sama warga. Isinya rinci, ngebahas dana buat program prioritas, kayak infrastruktur, pelayanan publik, sampe proyek kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbukaan ini, kita harap warga bisa ikut ambil bagian dalam Musrenbang, pastinya biar kebijakan dan keputusan yang diambil benar benar sesuai sama kebutuhan mereka di Kelurahan Gundaling II.

Sedangkan menurut Bapak LG bentuk transparansi Kelurahan Gundaling II sudah diperlihatkan dengan adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat dan dengan mengumumkan berapa anggaran yang diterima oleh Kelurahan Gundaling II dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terutama pekerjaan dalam bentuk fisik. Berikut pernyataan Bapak LG selaku Kepling IV Kelurahan Gundaling II:

“Transparansi di Kelurahan Gundaling II sudah kita tunjukkan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, dan ini termasuk pengumuman anggaran yang kita terima. Khususnya untuk pekerjaan fisik, kita berusaha untuk lebih terbuka dengan memberitahu berapa anggaran yang digunakan. Maka dari itu sebagai bentuk komitmen kita agar warga tahu persis bagaimana dana publik digunakan. Kami percaya bahwa dengan

keterbukaan ini, kita bisa membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kelurahan Gundaling II”

Kemudian menurut salah satu warga dari Kelurahan Gundaling II menyatakan:

“Sebagai salah satu warga Kelurahan Gundaling II, kami merasa senang karena Kelurahan kita udah bikin semua kegiatan terbuka buat kita. Mereka ngumumin berapa dana yang diterima, khususnya buat proyek-proyek fisik. Itu bikin kita bisa tahu gimana dana itu kita dipake. kami yakin, dengan transparansi kayak gini, kita bakal lebih percaya dan bisa ikut andil dalam proses pembangunan di Kelurahan Gundaling II. Semoga terus dipertahankan”

Berdasarkan dari ketiga informan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Kelurahan Gundaling II telah berkomitmen untuk menciptakan transparansi dalam laporan keuangannya, terutama terkait alokasi dana dan proyek-proyek Musrenbang. Melalui pengungkapan yang jelas, mereka memberikan akses yang mudah dan pemahaman transparan kepada masyarakat. Rincian alokasi dana untuk program-program prioritas, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan proyek kesejahteraan, diumumkan secara terbuka. Ini bertujuan agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam proses musrenbang, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi beragam lapisan masyarakat di Kelurahan Gundaling II.

Analisis Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi adalah hal yang penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan persyaratan utama untuk semua dimensi akuntabilitas lainnya. Organisasi yang transparan menjamin akses ke publik, media, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi juga menuntut kebenaran informasi yang diberikan kepada semua pihak pemangku kepentingan dan publik. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang atau pengguna informasi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka.

Analisis transparansi laporan keuangan Kelurahan Gundaling II mengungkapkan sejumlah dimensi krusial yang mempengaruhi keterbukaan dan keterpahaman informasi keuangan oleh masyarakat. Pertama-tama, laporan keuangan perlu memastikan pengungkapan yang jelas terkait alokasi dana dari Musrenbang, mencakup proyek-proyek dan program prioritas. Semakin rinci informasi ini, semakin tinggi tingkat transparansi yang dapat dicapai. Selanjutnya, evaluasi keterbacaan dan keterpahaman laporan menyoroti kebutuhan akan bahasa yang sederhana dan penyajian grafis yang mendukung, sehingga informasi dapat diakses dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Aspek aksesibilitas informasi juga menjadi fokus analisis, dengan mempertimbangkan cara laporan keuangan tersedia bagi masyarakat, baik melalui daring, kantor kelurahan, atau tempat umum lainnya. Poin penting lainnya adalah melibatkan masyarakat dalam penyusunan laporan, memberikan peluang bagi warga untuk memberikan masukan atau umpan balik. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi laporan.

Terakhir, pemberian informasi kontekstual dalam laporan menjadi aspek kunci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, program, dan proyek yang didanai. Ini membantu masyarakat mengaitkan angka-angka dengan dampak nyata dalam konteks kehidupan mereka. Dengan demikian, analisis ini memberikan pandangan komprehensif tentang transparansi laporan keuangan Kelurahan Gundaling II, memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan dalam upaya mencapai tingkat keterbukaan dan pemahaman yang optimal.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas penelitian ini sudah selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi laporan keuangan Kelurahan Gundaling II sudah dikelola dengan optimal dan mengedepankan keterbukaan.

KESIMPULAN

Dalam konteks akuntabilitas, Kelurahan Gundaling II memandang akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan di kelurahan tersebut. Hal ini melibatkan proses Musrenbang, rapat tahunan yang melibatkan masyarakat untuk membahas perencanaan dalam satu tahun. Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelurahan, yang dilaporkan ke kecamatan. Proses ini melibatkan perencanaan yang terstruktur, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta pembuatan laporan keuangan sesuai aturan. Dari hasil wawancara dengan Lurah dan staf Kelurahan, terlihat bahwa konsep akuntabilitas dijalankan dengan konsisten dan terstruktur.

Bentuk transparansi dalam laporan keuangan Kelurahan Gundaling II melibatkan pengungkapan yang jelas mengenai alokasi dana dari Musrenbang. Laporan ini dirancang untuk menjadi transparan, mudah diakses, dan dimengerti oleh warga. Informasi rinci tentang

dana untuk program prioritas, seperti infrastruktur dan pelayanan publik, diumumkan secara terbuka. Laporan keuangan ini menjadi instrumen utama dalam mendukung prinsip-prinsip musrenbang yang inklusif dan partisipatif di tingkat kelurahan.

Pentingnya transparansi ini ditegaskan oleh staf Kelurahan dan warga setempat. Dengan keterbukaan ini, diharapkan warga dapat ikut ambil bagian dalam proses Musrenbang dan kebijakan pembangunan, membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Gundaling II.

Secara keseluruhan, Kelurahan Gundaling II telah berkomitmen untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Proses Musrenbang, partisipasi masyarakat, dan pengungkapan informasi menjadi elemen kunci dalam menilai kualitas akuntabilitas dan transparansi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan Kelurahan Gundaling II dapat terus meningkatkan praktik akuntabilitas dan transparansi demi kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika Sari, N., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Publicand Business Accounting*, 3(1), 27–40.
- Azmi, Z., & Nasution, A. A. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Arista, R., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (Pud) Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5), 585-594.
- Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 10).
- Komite SAP, PP No. 71 Tahun 2022 Tentang SAP: tentang tata naskah dinas elektronik dilingkungan pemerintah daerah.
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kelurahan. (n.d.).
- Rustiyanti Rahayu, D., Halim MSA, M. S., & SE M Akun Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Jl Karimata No, G. A. (2019). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK NO. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien di Jember).
- Simarmata, Buana B. (2023). Kecamatan Berastagi Dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Karo. hlm. 7. ISSN 2962-6307
- Saren, C. M., Tinangon, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan

Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. In Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing"GOODWILL (Vol. 13, Issue 1).

Sari, A. P., & Nurlaila, N. PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA).

Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.

Wisnawati, dkk. (2018). Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa DI Kecamatan Anngeraja kabupaten Enrekang Rappang. Jurnal STISIP Muhammadiyah Rappang, Vol. 4 N0.2, hal 113.